

THE EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL SERVICE OFFICE IN THE NON-HARVEST FOOD AID DISTRIBUTION PROGRAM IN DATU KUNING VILLAGE, AMUNTAI TENGAH DISTRICT

Reka Amalia¹ ✉, Sugianor², Mawarti³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: ✉¹ amaliarika655@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: June 23, 2026
Revised: July 30, 2026
Accepted: August 7, 2026
Published: August 31, 2026

Kata Kunci:

Efektivitas Kinerja, Program BPNT, Dinas Sosial

Keywords:

Performance Effectiveness,
BPNT Program, Social
Service

Doi:

<https://doi.org/10.36658/datu.v3.i1.1975>

ABSTRAK

Kemiskinan adalah permasalahan sosial utama yang memerlukan penanganan tepat sasaran melalui bantuan sosial seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Dinas Sosial belum optimal. Meskipun aspek perencanaan dan kemanfaatan bantuan sudah berjalan efektif, namun indikator ketepatan sasaran, sosialisasi edukatif, dan pemantauan program masih dinilai kurang efektif. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan e-warung yang strategis, sedangkan faktor penghambat meliputi jadwal penyaluran yang tidak konsisten, rendahnya pemahaman masyarakat, serta lemahnya pengawasan langsung di lapangan. Kesimpulannya, penguatan fungsi monitoring dan validasi data secara partisipatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bantuan sosial.

ABSTRACT

Poverty is a major social problem that requires targeted handling through social assistance such as the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). This study aims to analyze the effectiveness of the Social Service's performance in implementing the BPNT program in Datu Kuning Village, Amuntai Tengah District. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the effectiveness of the Social Service's performance has not been optimal. Although the aspects of planning and aid benefits have been effective, the indicators of targeting accuracy, educative socialization, and program monitoring are still considered less effective. The main supporting factor is the availability of strategic e-warungs, while the inhibiting factors include inconsistent distribution schedules, low public understanding, and weak direct supervision in the field. In conclusion, strengthening the monitoring function and participatory data validation is urgently needed to improve the quality of social assistance services.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Keberhasilan pelaksanaan suatu program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja instansi pelaksana. Dinas Sosial sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program BPNT memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan capaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008).

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah, pelaksanaan Program BPNT masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan adanya keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya informasi mengenai mekanisme program, serta keterlambatan penyaluran bantuan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program BPNT masih perlu dikaji lebih lanjut.

Efektivitas pelaksanaan program merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu program bantuan sosial. Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana. Budiani (dalam Amrizal, 2018: 59–60) menyatakan bahwa efektivitas program dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program BPNT.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan dan efektivitas program bantuan sosial, khususnya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT belum sepenuhnya efektif, terutama pada aspek ketepatan sasaran penerima bantuan dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ditemukan masih adanya penerima bantuan yang tergolong mampu, sementara masyarakat yang berhak justru belum terakomodasi secara optimal. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan pemanfaatan bantuan belum sesuai dengan tujuan program.

Penelitian lain oleh Sari (2022) menyimpulkan bahwa kinerja aparatur Dinas Sosial secara umum sudah cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Faktor-faktor tersebut

berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan dan pencapaian tujuan program. Temuan-temuan penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT sangat bergantung pada kinerja instansi pelaksana, akurasi data, serta intensitas sosialisasi dan pemantauan program.

Hasil penelitian Ernawati (2024), misalnya, menunjukkan bahwa program BPNT belum sepenuhnya efektif akibat penggunaan data penerima yang belum diperbarui serta minimnya edukasi kepada masyarakat. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sari (2022) yang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya aparatur dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program BPNT menjadi penting untuk dilakukan, khususnya pada konteks lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas kinerja Dinas Sosial dalam Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan program BPNT, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program bantuan sosial di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam pada kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan analisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2017; Anggara, 2015). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan, wawasan, dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan Program BPNT, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip, laporan, dan peraturan yang tersedia pada Dinas Sosial, khususnya di bidang fakir miskin. Sumber data dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara terencana berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan pengujian kesimpulan (Sugiyono, 2022). Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas yang dilakukan dengan perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketelitian peneliti, triangulasi sumber dan metode, analisis terhadap kasus negatif, pemanfaatan bahan pendukung, serta pelaksanaan member check kepada informan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Bina Keluarga Balita Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui sistem penyaluran yang transparan dan akuntabel guna mendorong kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program nasional ini dikelola oleh Kementerian Sosial dengan dukungan teknis dari Dinas Sosial serta Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Sebagai kerangka analisis dalam pembahasan ini, efektivitas kinerja diukur menggunakan teori Budiani (dalam Dedi amrizal, dkk 2018: 59-60) yang mencakup empat variabel utama: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, serta pemantauan program.

1. Ketepatan Sasaran Program

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta program bantuan telah sesuai dengan target sasaran yang ditentukan sebelumnya.

a. Ketepatan Sasaran Terhadap Program

Ketepatan Sasaran terhadap Program adalah target spesifik dan dapat ditindak lanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu yang lebih kecil, seperti satu tahun atau kurang, untuk mencapai objektifitas tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui proses verifikasi data penerima BPNT di Desa Datu Kuning telah berjalan masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari kesesuaian penyaluran bantuan dengan sasaran yang masih kurang tepat, yaitu masih ada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tapi belum bisa mendapatkan bantuan tersebut . Dan ada juga beberapa penerima bantuan menyatakan bahwa program bantuan pangan non tunai ini memang telah membantu kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan walaupun ada keterlambatan 1 atau 2 hari dalam penyalurannya. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian data (inkonsistensi), di mana masih terdapat warga lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri dan masyarakat yang benar-benar kurang mampu namun tidak tersentuh bantuan ini. Sebaliknya, terdapat pula orang-orang yang dinilai tidak berhak namun terdaftar sebagai penerima. Hal ini didukung oleh pendapat masyarakat non-KPM yang menyatakan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya menjangkau warga yang paling layak secara ekonomi.

b. Perencanaan Terhadap Program

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tahap perencanaan dilakukan sebelum program dijalankan agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui proses verifikasi data penerima BPNT di Desa Datu Kuning telah berjalan sudah efektif. Proses perencanaan dan verifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang jelas dan terstruktur, yaitu pendataan awal oleh RT dan pemerintah desa. Verifikasi data dilakukan melalui kunjungan rumah untuk melihat langsung kondisi ekonomi dan keadaan tempat tinggal calon penerima bantuan, serta melalui wawancara langsung mengenai pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga. Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa koordinasi antara aparat desa, RT, dan Dinas Sosial berjalan harmonis, hal ini mendukung pelaksanaan yang teratur dan mengurangi potensi kesalahan atau kecemburuan sosial.

Tahap perencanaan dinilai sudah efektif karena dilakukan melalui prosedur yang jelas. Dinas Sosial bersama aparat desa melakukan verifikasi data dengan berpedoman

pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses ini melibatkan pengecekan dokumen seperti KK dan KTP serta tindakan proaktif berupa kunjungan langsung ke rumah calon penerima (*home visit*) untuk melihat kondisi fisik tempat tinggal dan kemampuan ekonomi secara riil.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi adalah salah satu media atau sarana yang mempengaruhi tentang kepribadian dari seseorang sangatlah bergantung terhadap cara individu tersebut bersosialisasi dengan orang lain.

a. Sumber Informasi Yang Diterima

Sumber informasi yang diterima merupakan segala bentuk data, pengetahuan, dan penjelasan yang diperoleh masyarakat terkait pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Informasi ini biasanya disampaikan oleh pihak yang berwenang, seperti Dinas Sosial, perangkat desa, pendamping sosial, maupun melalui media resmi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber hasil yang diterima dari penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning telah berjalan sudah efektif. Karena sebagian besar dilakukan oleh perangkat desa dan pendamping sosial. Informasi disalurkan melalui informasi ke desa, sehingga masyarakat dapat menerima pemberitahuan dengan baik. Meskipun sebagian warga masih mengandalkan informasi dari sesama warga, secara umum mekanisme penyampaian informasi sudah berjalan efektif dan membantu kelancaran penyaluran bantuan di desa tersebut.

Penyampaian informasi jadwal dan ketentuan penyaluran di Desa Datu Kuning telah berjalan efektif. Masyarakat mendapatkan informasi yang pasti melalui koordinasi antara aparat desa, ketua RT, dan pendamping sosial. Mekanisme penyampaian ini dinilai berhasil karena informasi tersebut tersebar secara merata melalui saluran komunikasi lokal, sehingga warga mengetahui kapan bantuan cair.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan aktivitas dari organisasi untuk mewujudkan dan mengintegrasikan tujuan organisasi maupun individu, berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat dua kepentingan dalam berorganisasi yaitu individu dan kepentingan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning kurang efektif. Karena sosialisasi jarang dilakukan, tidak menjangkau seluruh wilayah desa, dan tidak semua warga mendapatkan penjelasan langsung. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami informasi program karena penyebaran informasi tidak merata. Secara umum, rendahnya frekuensi dan cakupan sosialisasi menjadi faktor utama ketidakefektifan pelaksanaan program.

Pelaksanaan sosialisasi secara substansial dinilai kurang efektif. Peneliti menemukan bahwa kegiatan sosialisasi yang bersifat edukasi formal mengenai aturan teknis, mekanisme graduasi, dan hak-hak penerima sangat jarang dilakukan. Jarangnya frekuensi sosialisasi ini menyebabkan banyak warga, terutama lansia, masih bingung mengenai cara kerja program dan mekanisme pembaruan data jika terjadi masalah.

3. Tujuan Program

Tujuan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah bagi keluarga penerima manfaat. Selain itu, BPNT juga bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dengan memberikan pilihan yang lebih fleksibel dalam menentukan jenis bahan pangan yang dibutuhkan. Sehingga penerima dapat mengatur konsumsi keluarga secara efektif.

a. Kesesuaian Antar Hasil Program

Kesesuaian program berarti seberapa tepat suatu program dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebutuhan masyarakat. Jika program sudah berjalan sesuai rencana, memenuhi kebutuhan penerima manfaat, serta memberikan hasil yang diharapkan, maka program tersebut dinilai sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antar hasil program dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning sudah efektif. Terutama pada ketepatan guna dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu, proses penyaluran juga dinilai berjalan baik. Secara keseluruhan, program ini mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Program ini dinilai efektif. Bantuan yang disalurkan dalam bentuk bahan pangan pokok telah tepat guna dan dirasakan langsung manfaatnya oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Masyarakat merasa puas karena bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dasar rumah tangga mereka.

b. Tujuan Program Telah di Tetapkan

Tujuan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah bagi keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tujuan program yang telah ditetapkan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning kurang efektif. Karena ada beberapa saran dari masyarakat tentang harus diadakannya sosialisasi dan agar lebih baik lagi dalam dari penyaluran untuk kedepannya.

Pencapaian tujuan yang ditetapkan secara formal dinilai kurang efektif. Walaupun bantuan sampai ke tangan warga, pengawasan terhadap kualitas komoditas pangan dan upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat belum optimal. Masyarakat menyarankan perlunya pemantauan rutin sebulan sekali agar tujuan jangka panjang pemerintah benar-benar tercapai secara berkelanjutan.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa bantuan pangan non tunai disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Pemantauan Program

Pemantauan dalam program penyaluran BPNT sangat penting untuk menjamin bahwa bantuan pangan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak dan digunakan

sebagaimana mestinya. Dengan pemantauan yang baik, program BPNT dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning kurang efektif karena jarang dilakukannya pemantauan ataupun pengecekan dari atasan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut, sehingga sulit bagi masyarakat menyampaikan keluhan kesah mereka kalau ada masalah yang ingin disampaikan, dan jaranganya dilakukan pemantauan mungkin dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi dari pihak atasan.

Kegiatan pemantauan di lapangan dinilai kurang efektif. Peneliti mengamati bahwa petugas Dinas Sosial jarang hadir secara langsung saat proses penyaluran bantuan berlangsung di e-warung atau titik distribusi. Akibatnya, aspirasi atau keluhan mendadak dari warga sering tidak tertangani secara instan oleh instansi terkait.

b. Evaluasi Terhadap Masyarakat

Evaluasi terhadap masyarakat adalah proses untuk menilai dampak, penerimaan, dan kepuasan penerima manfaat (KPM/Keluarga Penerima Manfaat) BPNT. Tujuan utamanya adalah melihat bagaimana program tersebut benar-benar memengaruhi kehidupan mereka dan apakah proses penyaluran serta manfaatnya sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tujuan program yang telah ditetapkan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa datu kuning kurang efektif. Karena ada beberapa saran dari masyarakat tentang harus di adakannya sosialisasi dan agar lebih baik lagi dalam dari penyaluran untuk kedepannya.

Dampak program terhadap kepuasan masyarakat dinilai kurang efektif. Masih banyak saran dari warga mengenai perbaikan jadwal penyaluran yang tidak konsisten dan tuntutan transparansi harga bahan pangan di e-warung yang belum terpenuhi.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial Dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Datu Kuning

Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

a. Ketersediaan E-Warung di wilayah Desa Datu Kuning

Faktor pendukung Kinerja Dinas Sosial Dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai Didesa Datu Kuning Kecamatan Amuntai Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial dalam Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Datu Kuning ini sudah efektif. Dalam pelayanan pihak e- warung memang bagus yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam mencairkan bantuan tersebut, lokasi yang strategis sehingga memudahkan

masyarakat, jadi faktor yang mendukung adanya e-warung di desa ini karena sangat membantu bagi masyarakat.

Keberadaan e-warung di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau merupakan faktor pendukung utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, lokasi e-warung yang dekat dengan pemukiman warga sangat memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan atau menempuh jarak jauh untuk mencairkan bantuan. Pihak pengelola e-warung dinilai sangat kooperatif dan memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Kerjasama yang solid antara pengelola e-warung dengan aparat desa memudahkan penyelesaian kendala teknis di lapangan, seperti gangguan mesin EDC atau kendala data kartu, sehingga proses transaksi tetap berjalan tertib dan lancar.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah kendala-kendala riil di lapangan yang menyebabkan kinerja Dinas Sosial belum mencapai tingkat efektivitas maksimal.

a. Tidak Konsistennya Jadwal Penyaluran Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa datu Kuning dengan belum konsistennya waktu penyaluran bantuan menjadi membuat masyarakat bingung dalam menunggu waktu pencairan, terutamanya kepada masyarakat yang sedang bepergian ke sawah ataupun mencari ikan sulit untuk mengetahui informasi tersebut sehingga ada beberapa yang terlambat dalam pengambilan dan juga terkadang terlambat dalam waktu penyaluran bantuan tersebut.

Ketidakpastian jadwal pencairan dana BPNT setiap bulannya menjadi hambatan yang paling sering dikeluhkan. Perubahan jadwal yang mendadak menyebabkan KPM, terutama yang bekerja sebagai petani atau nelayan, merasa kesulitan dalam membagi waktu. Akibatnya, banyak warga yang terlambat mengambil bantuan karena informasi pencairan diterima saat mereka sedang berada di sawah atau perairan.

b. Kebingungan dan Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa datu Kuning tentang kebingungan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengakibatkan pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan non tunai di desa datu kuning masih menghadapi hambatan berupa kebingungan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program. Hal ini karena jarang ada sosialisasi serta terbatasnya penyampaian informasi secara langsung dan menyebarkan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran, jadwal pencairan, sehingga berdampak pada kurangnya efektifnya pelaksanaan program BPNT di desa tersebut.

Rendahnya tingkat sosialisasi mengakibatkan masyarakat kurang memahami mekanisme teknis program secara menyeluruh. Banyak KPM yang masih bingung mengenai jenis barang apa saja yang boleh dibeli serta prosedur pembaruan data jika terjadi masalah pada kartu bantuan mereka. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada kurangnya kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan program secara optimal.

c. Kurangnya Pengawasan dalam Proses Penyaluran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa datu Kuning dengan kurangnya pengawasan dalam proses penyaluran bahwa pengawasan dalam proses penyaluran BPNT masih lemah, kurangnya pengawasan tersebut menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan sesuai ketentuan, baik dari segi waktu penyaluran yang sering tidak tepat, mekanisme penyaluran yang belum sepenuhnya pas, maupun syarat-syarat barang apa saja dan apakah harus ada ketentuan apa saja yang harus dibeli dengan bantuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan program BPNT di Desa datu Kuning.

Lemahnya fungsi kontrol dan monitoring langsung dari pihak Dinas Sosial saat penyaluran berlangsung menyebabkan ketidaksesuaian prosedur di lapangan sulit terdeteksi. Ketiadaan petugas pengawas yang turun secara rutin ke desa mengakibatkan mekanisme penyaluran tidak berjalan sesuai standar operasional yang ketat, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan dan rasa tidak adil di tengah masyarakat terkait ketepatan sasaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang mendalam mengenai efektivitas kinerja Dinas Sosial dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Datu Kuning, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan strategis. Secara prosedural, efektivitas kinerja telah tercapai pada aspek perencanaan teknis dan pemanfaatan bantuan oleh KPM. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme verifikasi data melalui *home visit* yang membantu memvalidasi kondisi rill calon penerima, serta manfaat pangan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat miskin dalam mengurangi beban ekonomi harian mereka.

Namun, efektivitas kinerja Dinas Sosial belum mencapai level optimal jika diukur secara komprehensif. Terdapat kendala fundamental pada indikator ketepatan sasaran yang ditandai dengan masih adanya inkonsistensi data antara status ekonomi warga dengan status kepesertaan program. Selain itu, rendahnya frekuensi sosialisasi edukatif menyebabkan masyarakat masih mengalami keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme teknis dan aturan program. Fungsi pemantauan juga menjadi titik lemah yang krusial, mengingat jaranginya kehadiran fisik petugas pengawas saat penyaluran berlangsung, yang berdampak pada keterlambatan penyaluran dan kurangnya transparansi di lapangan.

Secara esensial, temuan ini melahirkan pokok pikiran baru bahwa efektivitas program bantuan sosial di tingkat pedesaan tidak bisa hanya mengandalkan kelancaran administratif formal dari instansi pusat. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh integrasi antara "Pengawasan Partisipatif" dan "Akurasi Data Dinamis". Instansi pelaksana harus menyadari bahwa data kemiskinan bersifat sangat fluktuatif, sehingga memerlukan mekanisme pemutakhiran data yang melibatkan peran aktif aparat desa dan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Kinerja Dinas Sosial akan mengalami peningkatan signifikan apabila terdapat sistem evaluasi bulanan yang melibatkan otoritas desa secara formal untuk melakukan audit data mandiri. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah penguatan sinkronisasi data antar level pemerintahan dan peningkatan frekuensi monitoring langsung guna memastikan bahwa perlindungan sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan (lansia dan fakir miskin). Melalui

perbaikan fungsi pengawasan dan transparansi, diharapkan kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat terwujud sesuai dengan visi dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D. (2018) *Efektivitas program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan*. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.
- Bintang, A. and Widowati, N. (2017) 'Kinerja organisasi publik dalam pelayanan masyarakat', *Journal of Public Administration Studies*, 2(1), pp. 45–56.
- Ernawati, M. (2024) *Efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) program sembako di Kecamatan Aweyan Kabupaten Balangan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020) *Pedoman pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Republik Indonesia (2008) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Indonesia: LL SETNEG.
- Sari, A.P. (2022) *Kinerja aparatur dinas sosial dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada lanjut usia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik.
- Sugiyono (2019) *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.